



Wahyu Wiji Utomo, S. Sos., M.Pem.I.

# FILSAFAT POLITIK ISLAM

Sejarah, Gagasan, dan Pemikiran

**FILSAFAT POLITIK ISLAM**  
**SEJARAH, GAGASAN, DAN WARISAN PEMIKIRAN**

**Wahyu Wiji Utomo. Sos. M. Pem. I**

**KUTIPAN PASAL 72:  
Ketentuan Pidana Undang-Undang Republik  
Indonesia**

**Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**FILSAFAT POLITIK ISLAM**  
**SEJARAH, GAGASAN, DAN WARISAN PEMIKIRAN**

**Copyright © 2023**

**Penulis:**

Wahyu Wiji Utomo. Sos. M. Pem. I

**Editor**

Sri Ulfa Rahayu. M. TH

**Setting Lay-out & Cover:**

Tim Redaksi

**Diterbitkan oleh:**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Semesta Alam, yang dengan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan buku ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kami, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, sebagai teladan dan pembawa cahaya petunjuk bagi seluruh umat.

Buku ini berjudul "*Filsafat Politik Islam, Sejarah, Gagasan, Dan Warisan Pemikiran*" yang membahas tentang landasan kebijakan politik berdasarkan nilai-nilai Islam yang agung. Dalam perjalanan penyusunan buku ini, kami berusaha menggali pemahaman mendalam tentang pemikiran politik dalam Islam, yang penuh hikmah dan pedoman bagi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat.

Kami menghadirkan buku ini sebagai kontribusi kami dalam meresapi dan memperdalam filsafat politik Islam, mengajak pembaca untuk berdiskusi dan merenungi makna sejati dari keadilan, toleransi, dan kebersamaan dalam konteks politik.

Dalam perjalanannya, buku ini membahas tentang implementasi nilai-nilai Islam dalam politik formal, tantangan yang dihadapi, serta potensi peran Islam dalam membentuk peradaban yang bermartabat dan bermanfaat bagi umat manusia.

Kami berharap buku ini dapat memberikan inspirasi, wawasan, dan pemahaman yang mendalam tentang konsep politik dalam Islam, sehingga dapat menjadi panduan bagi para pemimpin, akademisi, dan seluruh pembaca yang peduli akan masa depan bangsa dan umat.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, inspirasi, dan bantuan dalam penyusunan buku ini. Semoga buku "*Filsafat Politik Islam*" ini bermanfaat dan menjadi jalan menuju keadilan, harmoni, dan kemajuan dalam sistem politik yang berlandaskan Islam. *Amin.*

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, 05 April 2023

Penulis



**Wahyu Wiji Utomo. Sos. M. Pem. I**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PENGANTAR</b> -----	<b>i</b>
Kutipan Pasal 72 -----	i
Copyright -----	ii
Kata Pengantar -----	iii
Daftar Isi -----	iv

### **BAGIAN 1** **SEJARAH FILSAFAT POLITIK ISLAM**

---

<b>BAB 1: LANDASAN FILSAFAT POLITIK ISLAM</b> -----	<b>1</b>
A. Pengertian Filsafat Politik Islam -----	1
B. Ruang Lingkup Filsafat Politik Islam-----	2
C. Transformasi Filsafat Yunani Menjadi Filsafat Politik Islam---	4
D. Filsafat Politik Islam Dalam Alquran Dan Hadist-----	7
E. Islam Sebagai Landasan Filsafat Politik -----	20
<b>BAB 2: DIMENSI FILSAFAT POLITIK ISLAM</b> -----	<b>25</b>
A. Dimensi Teologis: Filsafat Politik Islam -----	25
B. Dimensi Ontologis: Filsafat Politik Islam-----	28
C. Dimensi Epistemologis: Filsafat Politik Islam -----	29
D. Dimensi Etis: Filsafat Politik Islam -----	31
E. Dimensi Filosofis: Filsafat Politik Islam -----	32
<b>BAB 3: Filsafat Politik Islam Dalam Lintasan Sejarah</b> -----	<b>34</b>
A. Filsafat Politik Islam pada Masa Rasulullah -----	34
B. Filsafat Politik Islam pada masa Khulafaurasyidin -----	41
C. Filsafat Politik Islam pada masa Bani Umayyah -----	50
D. Filsafat Politik Islam pada masa Bani Abbasiyah-----	52
<b>BAB 4: FILSAFAT POLITIK ISLAM DALAM PERADABAN</b> -----	<b>55</b>
A. Filsafat Politik Islam Abad Klasik-----	55
B. Filsafat Politik Islam Menuju Abad Moderen-----	56
C. Pemi Filsafat Politik Islam Menuju Abad Kontemporer-----	59

**BAGIAN 2**  
**GAGASAN FILSAFAT DAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM**

---

<b>BAB 5: PEMIKIRAN POLITIK IBNU ABI RABI</b> .....	<b>64</b>
A. Biografi Ibnu Abi Rabi.....	64
B. Ibnu Abi Rabi Pemikiran Politikny.....	65
C. Politik sebagai alat bukan Tujuan .....	77
D. Legitimasi Terhadap Penguasa Yang Ada.....	78
E. Asal Usul Kota Atau Negara.....	79
F. Bentuk pemerintahan .....	80
<b>BAB 6: PEMIKIRAN POLITIK IBNU AL FARABI</b> .....	<b>82</b>
A. Biografi Ibnu Abi Rabi.....	82
B. Prinsip-Prinsip Asosiasi Politik Al-Farabi .....	85
C. Organ Utama Dan Penguasa Utama (ra'is) .....	87
D. Kualifikasi penguasa utama (ra'is) .....	88
E. Kota Yang Mulia .....	90
F. Kota-Kota Yang Tidak Mulia .....	92
G. Perkembangan Kota Dan Tujuan Kebahagiaan .....	97
H. Ketidakteraturan Dan Pertikaian .....	99
I. Keadilan Politik Dan Ketakwaan Agama .....	100
J. Hubungan Antara Jiwa Dan Kota .....	104
<b>BAB 7: PEMIKIRAN POLITIK AL MAWARDI</b> .....	<b>110</b>
A. Biografi Al Mawardi .....	110
B. Teori Politik Al Mawardi .....	111
C. Suksesi Kepemimpinan .....	116
D. Penunjukan Dan Keistimewaan.....	121
E. Tugas Dan Fungsi Imam .....	122
F. Deposisi Imam .....	124

<b>BAB 8: PEMIKIRAN POLITIK AL GHAZALI -----</b>	<b>129</b>
A. Biografi Al Ghazali -----	129
B. Persatuan Agama Dan Politik -----	130
C. Reformasi Negara Dan Masyarakat -----	131
D. Penindasan dan tirani: Fir'aun dalam Al-Qur'an -----	136
E. Demokrasi Dan Konsultasi -----	138
F. Keadilan Sosial Sebagai Perintah Ilahi-----	142
G. Prinsip Kesetaraan Gender -----	145
H. Posisi Non-Muslim Dalam Sistem Politik Islam-----	148
I. Kemajuan Dan Perlawanan Dalam Perjuangan Suci-----	150
J. Nasionalisme, Arabisme, Dan Ummah-----	153
<b>BAB 9: PEMIKIRAN POLITIK IBNU TAIMIYAH-----</b>	<b>160</b>
A. Biografi Ibnu Taimiyah -----	160
B. Pemikiran Politik Yang Bersendikan Agama -----	161
C. Menunaikan Amanat -----	166
D. Kontribusi Dan Warisan -----	169
<b>BAB 10: PEMIKIRAN POLITIK IBNU KHALDUN -----</b>	<b>171</b>
A. Biografi Ibnu Khaldun-----	171
B. Karya Ibnu Khaldun -----	172
C. Konsep Negara dan Pemerintahan menurut Pemikiran Ibn Khaldun -----	173
D. Politik dalam Pandangan Ibn Khaldun -----	176
E. Otoritas Instirusi Dan Sosiologi Politik_ -----	178
F. Budaya Dan Etika Politik -----	180
G. Politik Ilahiah -----	185

**BAGIAN 3**  
**WARISAN PEMIKIRAN FILSAFAT POLITIK ISLAM**

---

<b>BAB 11: IMPLEMENTASI FILSAFAT POLITIK ISLAM -----</b>	<b>190</b>
A. Negara Islam dan Implementasi Filsafat Politik Islam -----	190
B. Tujuan Negara Islam -----	192
C. Partai Politik Islam dan implementasi-----	198
<b>Daftar Pustaka -----</b>	<b>205</b>
<b>Daftar Indeks -----</b>	<b>214</b>

## BAB 1

# LANDASAN FILSAFAT POLITIK ISLAM

### A. Pengertian Filsafat Politik Islam

Apakah yang dimaksud dengan filsafat politik islam? Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai dimensi filsafat politik islam maka kita harus memahami secara sederhana pengertian filsafat politik. Filsafat politik adalah suatu upaya untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan politik secara sistematis, logis, bebas, mendalam, serta menyeluruh. Sedikit menengok tentang filsafat politik Islam, bahwasanya Islam merupakan agama universal yang memberikan pedoman setiap aspek kehidupan manusia. Termasuk di dalamnya juga tentang aspek kehidupan bernegara. Khusus mengenai kehidupan bernegara, Islam memberikan pedoman amat global, hanya diajarkan prinsip-prinsipnya, guna memberi kesempatan bagi interpretasi dan perkembangan masyarakatnya, sesuai dengan kebutuhan hidup yang senantiasa berkembang. Filsafat politik adalah cabang filsafat yang berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan cara yang ketat (*rigorous*).<sup>1</sup>

Dalam filsafat Islam, hampir tidak ada perbedaan yang mencolok dari rumusan yang ada dalam filsafat Yunani. Terbukti ketika mendebatkan filsafat politik Islam, pada umumnya bertolak pada pembagian klasik filsafat Islam ke dalam dua kelompok. Pertama, filsafat teoritis, atau disebut dengan *al-hikmah al-nazhariyyah*. Kedua, filsafat praktis atau *al-hikmah al-'amaliyyah*, atau biasa disebut dengan *al-'ilm al-madani*. Bagian pertama terkait dengan segala sesuatu sebagaimana adanya, sedangkan kedua terkait dengan segala sesuatu sebagaimana seharusnya. Jika filsafat teoritis terkait dengan fisika, metafisika, dan psikologi, maka filsafat praktis terkait dengan etika, ekonomi, dan politik. Etika mengatur tentang bagaimana seharusnya individu berperilaku, ekonomi mengatur pengelolaan rumah tangga, sedangkan politik mengatur suatu kota (*al-madînah*), *politea* atau negara. Dengan demikian, filsafat praktis mesti didasarkan atas filsafat teoritis. Dengan

---

<sup>1</sup> Brennan Jason, *Filsafat Politik*, ed. Sukron Hadi (Washington, D.C: Friedrich Naumann Foundation Indonesia, 2020). h 3.

makna lain, di mana filsafat teoritis berakhir, disitulah filsafat praktis bermula.<sup>2</sup>

*Filsafat Politik Islam adalah cabang dari filsafat Islam yang mempelajari cara bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam pengaturan politik. Filsafat ini menekankan pemahaman tentang konsep hukum, kedaulatan, demokrasi, dan peraturan yang berlaku di dalam masyarakat yang dipimpin oleh sebuah pemerintahan yang diatur oleh hukum Islam. Filsafat ini juga mempelajari bagaimana mencapai keseimbangan antara pemerintah dan hak-hak masyarakat, dan mengidentifikasi mekanisme untuk menjamin kontrol yang adil terhadap pemerintah. Filsafat Politik Islam menekankan perlunya adanya taat setia kepada hukum Allah dan menghormati hak-hak asasi manusia. Filsafat ini menekankan perlunya adanya parlementerisme, demokrasi, dan bukan pemerintahan monarki. Filsafat Politik Islam juga menekankan perlunya adanya hak untuk merdeka, berpendapat, dan berserikat. Filsafat ini juga menekankan perlunya adanya kesetaraan gender dan kesetaraan sosial.*

## **B. Ruang Lingkup Filsafat Politik Islam**

Filsafat politik Islam dan pemikiran politik Islam adalah dua konsep yang berbeda, meskipun keduanya memiliki kaitan erat dengan agama Islam dan politik. Filsafat politik Islam adalah studi tentang teori dan prinsip politik yang mendasari sistem politik Islam. Hal ini mencakup pengkajian tentang hak asasi manusia, keadilan sosial, dan pemerintahan yang adil dalam kerangka prinsip-prinsip Islam. Filsafat politik Islam juga membahas pandangan Islam terhadap masalah seperti demokrasi, hak minoritas, dan hubungan internasional.

Sementara itu, pemikiran politik Islam lebih menitik beratkan pada praktik politik yang dijalankan oleh masyarakat Muslim, dan cara mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan politik sehari-hari. Ini meliputi upaya untuk menciptakan pemerintahan yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam dan mengejar keadilan sosial, serta memperjuangkan hak-hak Muslim dan mempromosikan nilai-nilai agama dalam kebijakan publik.

---

<sup>2</sup> Yamani, “*Filsafat Politik Islam : Antara Al- Farabi dan Khomeini*” (Bandung: Mizan, 2002).h.31.

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan ini, pemikiran politik Islam sering mempertimbangkan strategi politik dan metode perjuangan seperti partisipasi dalam pemilihan umum, pembentukan partai politik, dan gerakan sosial. Filsafat politik Islam dan pemikiran politik Islam sama-sama berusaha untuk mencari solusi bagi masalah politik dan sosial, namun memfokuskan pada aspek yang berbeda dan memerlukan pendekatan yang berbeda pula.

Ruang lingkup Filsafat Politik Islam mencakup berbagai aspek kehidupan politik di dunia Islam, termasuk:

1. Teori dan praktik politik, seperti teori konstitusional, sistem pengaturan negara, hukum, pemerintahan, pemilu, parlemen, dan lainnya.
2. Perdebatan tentang demokrasi, hak asasi manusia, gender, separatisme, dan konflik politik.
3. Analisis politik dari perspektif Islam, seperti filosofi politik, politik luar negeri, dan hak kebijakan.
4. Pemahaman politik dari ajaran-ajaran Islam, seperti al-Quran, hadits, fiqh, dan ajaran politik dari para imam, seperti Imam 'Ali, Imam Abu Hanifah, dan Imam al-Ghazali.
5. Studi tentang konsep-konsep kunci dalam Filsafat Politik Islam, seperti sistem khilafah, jihad, dan maqasid al-shariah.
6. Kajian tentang pergeseran politik di dunia Islam, seperti pengaruh kekuatan asing, modernisasi, dan teknologi.
7. Kajian tentang pengaruh ekonomi dan sosial dalam politik Islam, termasuk faktor-faktor seperti ekonomi, pembangunan, dan migrasi.
8. Kajian tentang proses-proses politik di dunia Islam, seperti gerakan radikal, politik lokal, dan perkembangan politik regional.
9. Kajian tentang perbedaan pandangan politik di antara pemeluk agama Islam, seperti Sunni dan Syiah.
10. Kajian tentang hubungan antara Islam dan politik di dunia modern, termasuk perubahan politik di Timur Tengah.
11. Analisis tentang hubungan antara Islam dan pemerintahan modern, termasuk hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.
12. Kajian tentang bagaimana politik dan ajaran-ajaran Islam berkolaborasi untuk membentuk masyarakat yang beragama dan bebas.

13. Kajian tentang bagaimana politik Islam dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah global, seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan perang.
14. Kajian tentang bagaimana politik Islam dapat digunakan untuk membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.
15. Kajian tentang bagaimana ajaran-ajaran Islam dapat diintegrasikan dengan politik untuk membentuk sebuah sistem yang lebih adil.
16. Kajian tentang bagaimana politik Islam dapat digunakan untuk menciptakan masyarakat yang bermoral, beradab, dan beradab.
17. Pemahaman tentang bagaimana ajaran-ajaran Islam dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran politik dan pemahaman tentang politik
18. Kajian tentang bagaimana ajaran-ajaran Islam dapat digunakan untuk mengubah struktur politik dan ekonomi di dunia Islam.
19. Kajian tentang bagaimana Ajaran-ajaran Islam dapat diterapkan dalam praktik politik sehari-hari.
20. Kajian tentang bagaimana Ajaran-ajaran Islam dapat digunakan untuk membangun sebuah sistem politik yang berkualitas.
21. Kajian tentang bagaimana Ajaran-ajaran Islam dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi politik dan keadilan sosial.
22. Kajian tentang bagaimana Ajaran-ajaran Islam dapat digunakan untuk menciptakan kerukunan antarkepercayaan di dunia Islam.

### **C. Transformasi Filsafat Yunani Menjadi Filsafat Politik Islam**

Transformasi filsafat Yunani menjadi filsafat politik Islam menjadi topik bahasan yang menarik karena berkaitan dengan bagaimana filsafat Yunani diperkenalkan ke dunia Islam dan disesuaikan dengan keyakinan dan nilai-nilai Islam. Pengaruh filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles pada filsafat Islam juga dibahas. Berbagai kajian dan sumber ilmiah mengenai hal ini menunjukkan bahwa transformasi filsafat Yunani ke dalam filsafat Islam berperan penting dalam perkembangan pemikiran Islam dan ikut membentuk tradisi intelektual Islam.

Berbicara masalah peradaban, tidak bisa dilepaskan dengan masalah filsafat. Karena secara historis filsafatlah yang mengantarkan suatu kaum kedepan pintu gerbang peradabannya masing-masing seperti yang pernah dialami peradaban Yunani kuno dan peradaban Islam

(dimasa keemasan). Kedua peradaban yang pernah ada tersebut (terutama Islam) mencapai kegemilangannya setelah terlebih dahulu mengalami kegemilangan dalam bidang filsafat dan kegiatan ilmiah.<sup>3</sup>

Transformasi filsafat Yunani menjadi filsafat politik Islam terjadi melalui proses panjang yang dimulai pada abad ke-8 Masehi, ketika pemikir Muslim mulai mempelajari karya-karya filsafat Yunani dan memperkenalkannya ke dalam tradisi intelektual Islam. Filsafat Yunani pada masa itu sangat dihormati dan dianggap sebagai sumber kebijaksanaan yang besar.

Tidak pernah diketahui bagaimana proses yang tepat untuk menggambarkan transformasi dari filsafat Yunani menjadi Filsafat Politik Islam, namun ketertarikan dunia Islam terhadap filsafat Yunani sudah sejak lama terjadi dan hal ini menjadi semakin masif dengan adanya tradisi penerjemahan berbagai karya tulis asing ke dalam bahasa Arab.

Beberapa pemikir Muslim terkenal yang memainkan peran penting dalam transformasi ini antara lain Al-Farabi, Ibnu Sina (*Avicenna*), dan Ibnu Rusyd (*Averroes*). Mereka mempelajari dan menginterpretasikan karya-karya Aristoteles, Plato, dan filsuf-filsuf Yunani lainnya, dan mencoba mengintegrasikan pemikiran-pemikiran ini ke dalam tradisi Islam.

Salah satu cara terpenting di mana filsafat Yunani mempengaruhi filsafat politik Islam adalah melalui pemikiran tentang hak-hak dan kewajiban individu dalam masyarakat. Filsafat Yunani mengajarkan bahwa individu memiliki hak-hak dan tanggung jawab yang harus dihormati oleh masyarakat, dan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak tersebut.

Dalam tradisi Islam, konsep hak-hak individu juga dikembangkan, terutama oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina. Mereka mengembangkan konsep tentang negara yang adil, yang harus memastikan keadilan sosial dan hak-hak individu dalam masyarakat. Mereka juga mengembangkan gagasan tentang tanggung jawab individu untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam filsafat politik Islam, juga terdapat pemikiran tentang hubungan antara agama dan negara. Salah satu konsep utama dalam filsafat politik Islam adalah bahwa negara harus berdasarkan pada

---

<sup>3</sup> Imam Chanafiah al-Jauhari, *Hermeuneutika Islam: Membangun peradaban Tuhan di Pentas Global* (Yogyakarta: Ittiqa, 1999).h 120.

prinsip-prinsip Islam, dan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab untuk mempromosikan nilai-nilai Islam dan memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Transformasi filsafat Yunani ke filsafat Islam berdampak cukup signifikan terhadap dunia Islam. Awalnya, penerimaan filsafat Yunani di dunia Islam beragam, dengan beberapa teolog konservatif dan sarjana hukum menolaknya sebagai merusak atau berlebihan.<sup>4</sup>

Namun, penerjemahan kitab-kitab Yunani ke dalam bahasa Arab menyebabkan munculnya filsafat Islam, yang mempengaruhi beberapa faktor, antara lain dinamika internal ajaran Islam, penyimpangan umat Islam setelah “*Khulafa ar-rasyidah*”, dan konflik antara kaum literis dan rasionalis. Munculnya filsafat Islam juga memiliki faktor eksternal, seperti serangan non-Islam terhadap doktrin Islam melalui argumentasi filosofis dan percampuran ilmu dan pengetahuan literal dengan filsafat.<sup>5</sup>

Transmisi pengetahuan klasik dari Yunani ke dunia Islam berdampak besar pada seni, arsitektur, sastra, filsafat, dan pencapaian teknologi Islam. Ilmu-ilmu dari satu bangsa saja, bangsa Yunani, telah sampai kepada kita, karena diterjemahkan melalui usaha Al-Ma'mun pada masa Abbasiyah. Dia berhasil dalam bidang ini karena dia memiliki banyak penerjemah dan menghabiskan banyak uang dalam hubungan ini.<sup>6</sup>

Selain kegiatan penerjemahan, transformasi filsafat Yunani ke dalam dunia Islam juga disebabkan oleh pergaulan umat Islam dengan kelompok lain baik Yahudi maupun Nasrani. Perdebatan-perdebatan tentang masalah qadha dan ikhtiar diantara umat Islam terjadi akibat merembesnya pemikiran kelompok lain tersebut yang sudah mengenal pemikiran Yunani<sup>7</sup>

Dalam banyak hal, transformasi filsafat Yunani menjadi filsafat politik Islam melibatkan penggabungan elemen-elemen dari kedua tradisi ini, dan menciptakan sebuah sintesis baru yang memadukan konsep-konsep dari kedua sumber tersebut. Hal ini menghasilkan sebuah tradisi

---

<sup>4</sup> Majid Fakhry, “Greek philosophy: impact on Islamic philosophy,” *Routledge Encyclopedia of Philosophy* (1998), h 10

<sup>5</sup> Jon Pamil, “Transformasi Filsafat Yunani Ke Dunia Islam Dan Kemunculan Filsafat Islam,” *An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam* 37, no. 2 (2012): 103–111.

<sup>6</sup> John Chanthalangsy, Phinith, Crowley, *Philosophy manual: a South-South perspective* (Rabat Morocco: UNESCO, 2014). H 92

<sup>7</sup> Hasan Hanafi, *Oksidentalisme, Sikap Kita Terhadap Tradisi Barat, Terjemahan : M. Najib Buchor* (Jakarta: Paramadina, 2000). h 243

filsafat politik Islam yang kaya dan kompleks, yang memainkan peran penting dalam sejarah pemikiran politik Islam dan yang masih relevan hingga saat ini.

Ada perbedaan mendasar antara agama dan filsafat, dan filsafat Islam tidak sesuai dengan filsafat Yunani karena filsafat Yunani terlalu rasionalistik. Namun, menunjukkan bahwa logika, yang merupakan aspek mendasar dari filsafat Yunani, telah digunakan oleh para filsuf Muslim seperti Ibnu Rusyd , Ibnu Sina , dan Al-Kindi . Sementara itu, membahas kesamaan antara filsafat Islam dan Yunani, dan mengeksplorasi konvergensi antara Islam dan filsafat pada umumnya. Secara keseluruhan, hasil pencarian menunjukkan adanya titik temu antara filsafat Yunani dan filsafat politik Islam, khususnya dalam hal logika dan pencarian kebenaran.

#### **D. Filsafat Politik Islam Dalam Alquran Dan Hadist**

Filsafat politik Islam didasarkan pada pemahaman Alquran dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam. Di bawah ini adalah beberapa prinsip filsafat politik Islam yang terkandung dalam Alquran dan Hadis:

1. Keadilan: Konsep keadilan sangat penting dalam ajaran Islam. Alquran menyatakan bahwa Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil dan tidak berbuat kerusakan. Oleh karena itu, prinsip keadilan harus dipegang teguh dalam sistem politik Islam.
2. Kepemimpinan: Kepemimpinan dalam Islam adalah tanggung jawab yang besar dan harus dijalankan dengan penuh integritas. Alquran menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil, tegas, dan berwibawa.
3. Kebijakan publik: Kebijakan publik dalam Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan. Alquran mengajarkan bahwa tindakan yang merugikan masyarakat secara umum harus dihindari, dan bahwa tujuan dari kebijakan publik adalah untuk memperbaiki kehidupan manusia.
4. Persaudaraan: Persaudaraan antar sesama manusia dalam Islam adalah sangat penting. Alquran mengajarkan bahwa semua orang sama di hadapan Allah, dan bahwa orang-orang harus saling mencintai dan membantu satu sama lain.
5. Kemerdekaan: Kemerdekaan dalam Islam adalah hak setiap individu, dan harus dihormati. Alquran mengajarkan bahwa

seseorang tidak boleh dipaksa untuk melakukan apa yang tidak ingin dilakukan, dan bahwa setiap orang harus memiliki hak untuk memilih agamanya sendiri dan mempraktikkan agamanya dengan bebas.

Dalam Hadis, beberapa konsep penting filsafat politik Islam meliputi:

1. Shura: *Shura* adalah prinsip konsultasi dalam Islam. Hadis menyatakan bahwa Rasulullah selalu meminta pendapat dari para sahabatnya sebelum membuat keputusan penting.
2. Amanah: Amanah adalah prinsip kepercayaan dan tanggung jawab dalam Islam. Hadis menyatakan bahwa seseorang yang dipilih untuk menjadi pemimpin harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan integritas.
3. Ihsan: Ihsan adalah prinsip kesempurnaan dalam Islam. Hadis menyatakan bahwa seseorang harus memperlakukan orang lain dengan baik dan mencoba untuk melakukan yang terbaik dalam setiap situasi.

Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita dapat mengembangkan sistem politik yang didasarkan pada nilai-nilai Islam yang mendorong keadilan, kebebasan, persaudaraan, dan kemerdekaan.

### **1. Keadilan :**

Konsep keadilan sangat penting dalam ajaran Islam. Alquran menyatakan bahwa Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil dan tidak berbuat kerusakan. Oleh karena itu, prinsip keadilan harus dipegang teguh dalam sistem politik Islam. Dalam perspektif Al-Qur'an, "*adl*" memiliki nilai intrinsik. Kesehatan dan keamanan dalam segala hal melekat pada 'adl. Dalam Kitab Wahyu ini 'adl dianggap sebagai prinsip fundamental dan esensial yang di atasnya dibangun kebenaran eksistensi, yang menurutnya kerja alam semesta terpenuhi dan berdasarkan mana pernyataan Kitab Wahyu dan hukum agama diselesaikan. Dari sudut pandang Al-Qur'an, 'adl adalah esensi sekaligus sumber eksistensi dan eksistensi muncul atas dasar dan sesuai dengannya

Dalam pandangan dan pemikiran Al-Qur'an, 'adl bukanlah sekedar konsep abstrak; itu lebih merupakan gagasan nyata yang berakar pada keberadaan dan sifat primordial manusia. Oleh karena itu, ini adalah konsepsi yang nyata dan esensial, dan bukan konvensional, karena memerintah hanya tatanan abstrak dan konvensional secara umum,

mencakup semua dan abadi dan dalam semua dimensi keberadaan individu dan kolektif akan menjadi tidak berarti dan tanpa nilai. Namun, Allah telah menekankan perjuangan tanpa henti untuk 'adl dan perwujudannya dalam keseluruhan kehidupan manusia

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ اِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. ( Al Maa-idah ayat 8)*

Dalam Al-Qur'an makna adil disebutkan dalam dua bentuk, al-'Adl dan al-Qist. Qist kadang-kadang diartikan sebagai sinonim untuk 'adl dan kadang-kadang sebagai kebalikannya, juga berarti bagian dan porsi. Dikatakan bahwa 'qistas' yang berarti "ukuran dan skala" telah diturunkan dari qist yang berarti 'adl . Apalagi di antara nama-nama indah Tuhan lainnya adalah adil, yang telah dijelaskan sebagai sinonim dengan adil. Qist adalah salah satu akar yang, seperti 'adl , merupakan ciri manusia, masyarakat, dan benda. Banyak peneliti dan penafsir tidak mempertahankan perbedaan apa pun antara kedua istilah ini dan menganggapnya sebagai sinonim. Misalnya, Imam Khomeini menulis: " Al-Qist , bunyi vokal yang berada di bawah huruf Q menandakan 'adl dan penempatannya setelah 'adl karenanya merupakan preferensi penafsiran.<sup>8</sup>

Di dalam Al-Qur'an, 'adl memiliki makna ontologis dan filosofis, pengertian pengukuran keberadaan, atribut esensi dan tindakan Kebenaran, dalam istilah antropologis sebagai 'adl dan perlawanan, disposisi abadi dan dalam istilah sosial dan politik sebagai kriteria dan ukuran urusan dan dalam semua kasus sebagai ketekunan, jalan lurus dan

---

<sup>8</sup> Imam Khomeini, *Exposition of Forty Hadith*, 16 ed. (Tehran: Institute for Compilation and Publication of the Works of Imam Khomein, 1998). H 577

moderasi. Atas dasar ini, 'adl dapat dijelaskan sebagai lurus ke depan, perlawanan dan jalan lurus menuju kepada kebaikan.

Dalam Filsafat Politik Islam Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya sifat adil dalam persaudaraan, prinsip 'adl' adalah persaudaraan dan persahabatan sesama manusia. Orang-orang beriman adalah saudara seiman satu sama lain dan persaudaraan ini mencakup semua dimensi kehidupan individu, karena Nabi sendiri mengambil langkah untuk mewujudkan persaudaraan ini di Madinah dan menyatakan orang-orang sebagai saudara seiman dengan memasukan persahabatan sebagai kontrak pengikat persaudaraan antara kaum Ansar dan Muhajirin.

Sementara itu menurut perspektif hadist sifat adil dalam politik islam mendapatkan tempat tersendiri disisi Allah. Ada 7 golongan yang dapat naungan Allah subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat, Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad shallahu 'alaihi wa sallam:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ ، فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

Artinya : *Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tujuh golongan yang dinaungi Allâh dalam naungan-Nya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan-Nya: "Imam yang adil, pemuda yang hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah, seorang yang hatinya terikat dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki yang diajak wanita yang kaya dan cantik untuk berzina, maka laki-laki itu berkata : aku takut kepada Allah, seorang yang bersodaqoh dengan sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanannya, seorang yang berdzikir kepada Allah sendirian sehingga matanya meneteskan air mata". (HR. al Bukhari)*

Al-Bukhari (no. 660, 1423, 6479, 6806)

## 2. Kepemimpinan :

Kepemimpinan dalam Islam adalah tanggung jawab yang besar dan harus dijalankan dengan penuh integritas. Alquran menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil, tegas, dan berwibawa. Kepemimpinan memiliki definisi yang luas dan menyeluruh yang melibatkan otoritas intelektual dan kepemimpinan politik. Setelah wafatnya Nabi, tugas menjaga prestasi beliau dan melanjutkan kepemimpinannya jatuh kepada Imam. Imam bertanggung jawab untuk mengajarkan manusia kebenaran Al-Qur'an, agama, dan aturan-aturan yang berkaitan dengan masyarakat. Dengan kata lain, Imam memiliki peran dalam membimbing manusia dalam segala aspek kehidupan mereka.

Jenis kepemimpinan seperti ini, yang diimplementasikan dengan cara yang benar dan tepat, sebenarnya merupakan manifestasi tujuan Islam dan pelaksanaan ajaran-ajarannya yang ditetapkan oleh Rasulullah. Imam memberikan eksistensi objektif pada cita-cita membentuk komunitas dan membangun kerangka hukum untuk pemerintahannya. Terkadang, konsep Imamah dan kepemimpinan juga digunakan dalam arti terbatas untuk merujuk pada seseorang yang secara eksklusif diberi tanggung jawab kepemimpinan sosial atau politik.

Namun, dimensi spiritual manusia sangat terkait dengan misi agama. Seorang Imam yang benar dan tepat adalah sosok yang mulia yang menggabungkan otoritas intelektual dan kepemimpinan politik. Dia menjadi pemimpin masyarakat Islam yang mampu menyampaikan hukum-hukum ilahi yang berlaku dalam setiap bidang kehidupan dan melaksanakannya. Selain itu, seorang Imam juga menjaga identitas kolektif dan martabat kemanusiaan umat Islam dari kemunduran dan korupsi.

Dalam Perspektif alquran maka kita akan temukan beberapa ayat yang bicara tentang kepemimpinan beberapa diantaranya yaitu :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا  
مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ

إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*<sup>9</sup> (Surat Al Baqarah Ayat 30)

Untuk dapat menjalankan fungsi kepemimpinan atau khalifah, manusia harus memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta menyebarkan kebaikan dan kemaslahatan. Hal ini merupakan hal yang sangat mendasar dan harus diterapkan. Tanpa kebenaran, keadilan, kebaikan, dan kemaslahatan, tatanan kehidupan umat manusia tidak akan dapat terwujud. Oleh karena itu, ini menjadi syarat utama bagi manusia untuk menjalankan peran sebagai khalifah dalam dirinya. Allah SWT berfirman yang berbunyi :

يٰۤاٰدُرُّدُّ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ  
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَظْلُمُوْنَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ  
عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٦١﴾

Artinya: *Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.* (Surat Shad Ayat 26)

Ini adalah pesan dari Allah SWT. kepada para penguasa agar memberikan keputusan diantara manusia dengan kebenaran yang telah diturunkan dari sisi-Nya. Jika menyimpang, mereka sesat dari jalan Allah. Sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi orang yang sesat dan melupakan hari perhitungan suatu siksa yang amat pedih. Salah satu tanda utama seorang pemimpin yang baik adalah mencintai dan didoakan oleh rakyatnya. Sebaliknya, pemimpin yang buruk akan dibenci dan dilaknat oleh rakyatnya. Rasulullah SAW. merupakan contoh yang

<sup>9</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir Quran Perkata* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009).h 6.

sempurna bagi umat Islam dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam hal kepemimpinan. Beliau adalah sosok yang memperlihatkan kepemimpinan yang luar biasa, di mana kepentingan umat adalah prioritas utama baginya. Oleh karena itu, sangatlah tepat jika kita mengidealkan visi dan model kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.

Manusia dipilih sebagai khalifah Allah karena mereka dianugerahi kelebihan berupa ilmu pengetahuan, yang tidak diberikan kepada makhluk lain termasuk malaikat. Ayat-ayat di atas mengungkapkan bahwa Allah mengajarkan manusia sebagai pengertian bahwa ilmu pengetahuan adalah modal atau syarat yang diperlukan untuk menjalankan fungsi dan peran sebagai khalifah.

Quraish Shihab menyatakan bahwa pengetahuan atau kemampuan untuk menyebutkan nama-nama merupakan syarat dan modal bagi manusia, termasuk Adam, dalam mengelola bumi ini. Musa Asy'arie juga menyatakan bahwa tugas seorang khalifah, yang memegang kepemimpinan dan kekuasaan, memiliki implikasi moral. Kepemimpinan dan kekuasaan khalifah dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau digunakan untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, kepemimpinan dan kekuasaan manusia harus disadari sebagai sifat sementara yang harus dijaga agar tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merusak tatanan dan harmoni kehidupan.<sup>10</sup> Sebagaimana yang tergambar pada sebuah Hadist :

فَضْرَبَ بِيَدِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمَلُنِي؟ قَالَ: قُلْتُ: عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، ثُمَّ قَالَ: عَلَيَّ مِنْكِبِي إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا

Artinya: *Suatu hari, Abu Dzar berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menjadikanku (seorang pemimpin)? Lalu, Rasul memukulkan tangannya di bahunya, dan bersabda, 'Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah, dan sesungguhnya hal ini adalah amanah, ia merupakan kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya, dan menunaikannya (dengan sebaik-baiknya).'" (HR Muslim).*<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Musa Asy'arie, *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: LSIF, 1992), h 38.

<sup>11</sup> Ahmad Sunarto, *Terjemah Riyadhus Sholihin Jilid I* (Jakarta: Pustaka Amani, 1999).h 619

Hadits tersebut mengungkapkan bahwa pemberian jabatan atau tanggung jawab kepada seseorang dianggap sebagai amanah, dan sebaiknya tidak ada orang yang menuntut atau menginginkannya kecuali jika dia memiliki kualifikasi yang cukup untuk menjalankannya.

### **3. Kebijakan publik**

Kebijakan publik dalam Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan. Alquran mengajarkan bahwa tindakan yang merugikan masyarakat secara umum harus dihindari, dan bahwa tujuan dari kebijakan publik adalah untuk memperbaiki kehidupan manusia. Kebijakan Publik dalam Islam berfungsi sebagai kebijakan umum yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, para ilmuwan dan cendekiawan Muslim klasik seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi menekankan pentingnya memastikan pemenuhan pilar-pilar maqashid shari'ah dalam semua kebijakan umum yang dihasilkan oleh para pemimpin (ulil amri) atau pemerintah Islam. *QS. An-Nahl ayat 125* bisa menjadi dasar melaksanakan tahap-tahap kebijakan publik

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُم بِآيَاتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ



Artinya:.. Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (An-Nahl ayat 125)

Hikmah dalam ayat tersebut bisa dimaknai sebagai Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil. Allah memerintahkan kita untuk melakukan dialog dengan kebijaksanaan (policy) dan menggunakan kata-kata yang benar dalam penyampaian kita agar dialog berjalan dengan sebaik mungkin.

Berikut ini adalah enam Prinsip Utama untuk memperbaiki kinerja Kebijakan Publik dalam perspektif Islam:

1. Ketuhanan (Ilahiah): Setiap aktivitas dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik harus berorientasi pada ketuhanan.
2. Kemanusiaan (Insaniah): Kebijakan yang diambil pada dasarnya ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.
3. Keseimbangan (Tawazun): Kebijakan yang dibuat harus memperhatikan semua dimensi secara seimbang dan proporsional.
4. Keadilan (Al-'Adalah): Kebijakan yang diambil harus berorientasi pada keadilan (tepat sasaran) berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keseimbangan.
5. Pelayanan (Al-Khadimah): Sesuai dengan peran perumus kebijakan (pemimpin) sebagai abdi, khadam, atau pelayan masyarakat, kebijakan yang dibuat harus berfokus pada pemberian pelayanan terbaik kepada masyarakat, berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keseimbangan, dan keadilan.
6. Keteladanan (Uswah Al-Hasanah): Selain sebagai abdi, khadam, atau pelayan masyarakat, perumus kebijakan juga berperan sebagai pemimpin. Hakikat kepemimpinan digambarkan oleh Rasulullah dengan kalimat "Sayyid al-qawm khaadimuhum" (pemimpin suatu kaum/masyarakat adalah hamba/pelayan bagi mereka).

Sementara itu dalam perspektif hadist kita akan menemukan hadist yang mengisyaratkan tentang perilaku yang bijak dalam mengambil keputusan. Dari Sahabat Abu Ya'la Syaddad bin Aus, dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda:

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ ابْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَلْيُجِدْ أَعْدَاكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ . [رواه مسلم]

Artinya: *Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiallahuanhu dari Rasulullah shollallohu 'alaihi wa sallam bersabda : Sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik (ihsan) atas segala sesuatu . Jika kalian membunuh maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Jika kalian menyembelih berlakulah baik dalam hal itu, hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. (Riwayat Muslim).*

Hadits ini adalah sebuah hadits agung yang menyatukan prinsip-prinsip dasar agama secara umum. Yang ditekankan adalah pentingnya tindakan yang sesuai dengan syariat dan akal. Prinsip ini berlaku dalam kehidupan seseorang di dunia maupun di akhirat. Prinsip pertama adalah kebijakan terhadap diri sendiri, tubuhnya, keluarganya, saudaranya, harta miliknya, dan orang-orang di sekitarnya. Dalam perspektif Filsafat Politik Islam maka bisa kita kaitkan bahwa adanya nilai atau prinsip yang diajarkan. Prinsip ini mengajarkan pentingnya memiliki sikap bijaksana dan bertanggung jawab terhadap aspek-aspek kehidupan pribadi dan sosial.

Prinsip kedua adalah iman, yang mencakup amal batiniah (kalbu) dan Islam, yang mencakup amal lahiriah (anggota badan). Prinsip ini menekankan pentingnya memperkuat iman dalam hati serta mengamalkannya melalui perbuatan yang nyata. Dalam rangkaian pesan ini, hadits tersebut menggaris bawahi pentingnya menjalani kehidupan yang seimbang, dengan memperhatikan aspek pribadi dan sosial, serta menggabungkan iman yang kuat dengan amal perbuatan yang baik.

#### **4. Persaudaraan:**

Persaudaraan antar sesama manusia dalam Islam adalah sangat penting. Alquran mengajarkan bahwa semua orang sama di hadapan Allah, dan bahwa orang-orang harus saling mencintai dan membantu satu sama lain. Ikatan persaudaraan merupakan salah satu tautan yang kuat dan melekat dalam hubungan manusia. Saudara saling mengasihi, memiliki hati yang baik satu sama lain, dan berbagi sukacita serta kesedihan bersama. Walaupun terkadang perbedaan muncul di antara saudara, yang dapat menimbulkan kecemasan, namun kehangatan ini segera digantikan oleh kasih sayang dan kesungguhan, sehingga keretakan tersebut benar-benar terlupakan.

Dalam Islam, hubungan yang erat ini dimanfaatkan untuk memperkuat tatanan sosial dan memperbaiki hubungan antar manusia. Islam menganggap semua Muslim yang taat sebagai saudara sejati. Berdasarkan keyakinan bahwa dua bersaudara bersatu melalui ayah mereka, yaitu Penutup para nabi dalam Islam, maka umat Islam dianggap sebagai anak-anaknya. Oleh karena itu, umat Islam secara keseluruhan dianggap sebagai saudara. Dalam konsep ini, yang dikenal sebagai

ukhuwah Islamiyah, tidak ada batasan dan semua umat Islam dari berbagai ras, daerah, dan bahasa termasuk dalam aturan ini, dianggap sebagai saudara oleh Islam.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ<sup>ع</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (Al-Hujurat Ayat 10)

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا<sup>ع</sup> إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ<sup>ع</sup> إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Al-Hujurat Ayat 13)

Sementara itu dalam perspektif hadis

عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - عن النبي - ﷺ - قال : " المؤمن للمؤمن كالبنيان ، يشد بعضه بعضاً ، ثم شبك بين أصابعه ، وكان النبي - ﷺ - جالساً ، إذ جاء رجل يسأل ، أو طالب حاجة أقبل علينا بوجهه ، فقال : اشفعوا تؤجروا ، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء " . رواه البخاري ، ومسلم ، والنسائي

Artinya: Dari Abu Musa Al Asy'ari ra. dari Nabi Muhammad saw bersabda: "Orang mukmin itu bagi mukmin lainnya seperti bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Kemudian Nabi Muhammad menggabungkan jari-jari tangannya. Ketika itu Nabi Muhammad duduk, tiba-tiba datang seorang lelaki meminta bantuan. Nabi hadapkan wajahnya kepada kami dan bersabda: Tolonglah dia, maka kamu akan mendapatkan pahala. Dan Allah menetapkan lewat lisan Nabi-Nya apa yang dikehendaki." Imam Bukhari, Muslim, dan An Nasa'i.

Persaudaraan yang kuat dalam islam bisa kita saksikan dalam politik dimana itu terlihat dalam persaudaraan sesama *muslim (Ikhwanul Muslimin)*. Apa yang terjadi pada organisasi Islam Mesir seperti Ikhwanul pasti akan bergantung pada faktor struktural di luar kendali mereka, termasuk kebijakan negara terhadap Islamis, kohesi internal rezim, dan konteks regional. Meskipun organisasi-organisasi Islam menghadapi krisis yang tampaknya tidak dapat diatasi, mereka masih jauh dari selesai dan masih memiliki banyak pilihan. Masa depan Islamisme tidak hanya bergantung pada faktor-faktor eksternal tetapi juga pada bagaimana kaum Islamis sendiri merespons khususnya sejauh mana kaum Islamis bersedia terlibat dalam proses revisi intelektual dan ideologis yang serius.

### **5. Kemerdekaan:**

Kemerdekaan dalam Islam adalah hak setiap individu, dan harus dihormati. Alquran mengajarkan bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk melakukan apa yang tidak ingin dilakukan, dan bahwa setiap orang harus memiliki hak untuk memilih agamanya sendiri dan mempraktikkan agamanya dengan bebas. Salah satu makna dari kebebasan adalah bahwa setiap individu harus memiliki otonomi penuh, tidak tunduk pada pengaruh atau kekuasaan makhluk lain, dan tidak bergantung pada makhluk lain. Sebagai contoh, jika seseorang berpendapat bahwa alam semesta ada dengan sendirinya, berdiri sendiri, dan tidak bergantung pada Tuhan, dan Kehendak Tuhan tidak mempengaruhi rotasi dan revolusinya, pernyataan tersebut mengandung makna bahwa kebebasan berarti membebaskan alam semesta dari segala bentuk kontrol ilahi.

Dalam konteks Filsafat politik islam, sebagai salah satu makhluk di dunia ini, manusia juga akan diberlakukan dengan aturan yang sama. Hal ini membuka peluang bagi kita untuk berpendapat bahwa manusia bebas dari segala bentuk ketergantungan dan pemujaan terhadap makhluk lain, termasuk Tuhan. Terkait dengan kemandirian alam semesta, terdapat dua pandangan yang berbeda.

Beberapa orang percaya bahwa tidak ada yang disebut "Tuhan" yang menjadi ketergantungan bagi alam semesta, dan alam semesta tersebut berdiri sendiri tanpa adanya kehendak dari entitas yang lebih tinggi. Sementara itu, ada yang berpendapat bahwa Tuhan memang ada dan menciptakan dunia, tetapi setelah penciptaan alam semesta, Tuhan

membiarkanannya berjalan sendiri tanpa campur tangan dan tidak memerlukan ketergantungan pada-Nya.

Dengan mematuhi aturan dan sistem yang telah ditetapkan Tuhan, alam semesta secara mandiri melanjutkan rotasi dan revolusi komponen-komponennya. Menurut pandangan ini, penciptaan alam semesta dapat diibaratkan seperti membangun sebuah bangunan. Setelah seorang kontraktor membangun gedung, kelangsungan hidup gedung tersebut tidak lagi tergantung pada keberadaannya. Gedung tersebut secara mandiri berdiri tanpa ketergantungan pada kontraktor. Meskipun kontraktor mungkin sudah meninggal, gedung tersebut akan tetap berdiri selama puluhan atau ratusan tahun.

Dalam pemikiran beberapa orang, dunia juga dipandang demikian. Tuhan menciptakannya dan setelah itu membiarkannya berjalan sendiri. Pandangan ini menolak "Rububiyah kosmis" Tuhan, sementara pandangan pertama menolak prinsip keberadaan Tuhan. Kedua pandangan tersebut tidak sesuai dengan pandangan tauhid dalam Islam.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: *dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (QS Asy-Syura Ayat ke-38)*

Surat tersebut menggambarkan bahwa dalam Islam, konsep musyawarah sangat dikenal, yang melibatkan penyampaian pendapat dan adu argumen. Dalam proses ini, penggunaan akal (ra'yu) sangat penting untuk mencapai keputusan yang benar dan memecahkan masalah. Dalam bukunya yang berjudul "*Tanzhim al-Islam*", Abu Zahrah bahkan menegaskan bahwa Al-Qur'an mendorong penelitian yang rasional terhadap dunia di sekitar kita, dan hal ini tidak mungkin terwujud tanpa kebebasan berpikir dan menyampaikan pendapat. Al-Qur'an sangat menghargai usaha rasional yang dilakukan dengan ketulusan dalam mencari kebenaran dan keadilan yang tentu saja menjadi dasar dalam filsafat politik islam.

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «من قَتَلَ مُعَاهِدًا لم يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وإن رِيحَهَا تُوجَدُ من مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا».  
[رواه البخاري] [صحيح]

Artinya: Abdullah bin 'Amr -*raḍiyallāhu 'anhumā*- meriwayatkan dari Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*-, bahwa beliau bersabda, "Siapa yang membunuh orang kafir muahid (orang kafir yang terikat perjanjian dengan negeri Islam) maka dia tidak akan mencium bau surga padahal bau surga itu dapat dirasakan dari jarak empat puluh tahun perjalanan." Diriwayatkan oleh Bukhari Hadis sahih

Dari hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa mu'ahad adalah sebutan untuk orang-orang yang melakukan perjanjian dengan umat Islam, meskipun agama mereka berbeda. Dalam literatur dan studi hadis, istilah mu'ahad sering kali digunakan untuk merujuk kepada ahl al-zimmah. Terkadang, istilah ini juga dapat digunakan untuk menyebut orang-orang kafir yang mencapai rekonsiliasi (*Ishlah*) dengan umat Islam tanpa melalui pertempuran selama periode tertentu. Dalam konteks ini, baik ahl al-zimmah maupun mu'ahad merupakan masyarakat yang berhak mendapatkan perlindungan, sesuai dengan isi hadis di atas.

Dasar dasar normatif tersebut kiranya menginspirasi Rasul SAW. Ketika menyusun piagam madinah bersama umat agama lain. Menurut fazlur rahman, piagam itu menjamin kebebasan beragama orang yahudi sebagai komunitas, dengan menekan kan kerjasama serat mungkin dengan kaum muslim dan menyerukan kepada orang islam dan yahudi agar bekerja sama demi keamanan kedua nya.<sup>12</sup>

## **E. Islam Sebagai Landasan Filsafat Politik**

Menurut konsep Barat, politik dan agama pada dasarnya memiliki perbedaan yang signifikan (kontras) dan bahkan sering terjadi konflik di antara keduanya. Kontras berarti keduanya tidak memiliki hubungan yang erat, masing-masing beroperasi secara independen. Politik terkait dengan urusan dunia material, sementara agama melibatkan baik aspek dunia material maupun aspek akhirat. Dalam pandangan Barat,

---

<sup>12</sup> Fazlur Rahman, *Islam, terj. Ahsin Muhammad* (Bandung: Pustaka Salman, 2000), h 12.

kehidupan akhirat dianggap sebagai ilusi yang tidak nyata, dan hanya kehidupan duniawi yang diakui sebagai kenyataan. Konflik muncul karena dipercaya bahwa keberadaan agama dapat menghambat kemajuan politik. Keduanya dianggap bertentangan dan sulit untuk saling merujuk satu sama lain.

Dalam kaitannya dengan masalah politik ini, kaum muslimin biasa mengatakan bahwa agama Islam berbeda dengan banyak agama lain. Pernyataan yang sering muncul serta stereotipikal itu memang mengandung hal itu akan berarti sama dengan mengingkari kenyataan sejarah yang telah berlangsung selama lebih dari empat belas abad dan yang masih akan berlangsung entah berapa abad lagi. Dan tentu hal itu juga akan berarti sama dengan mengingkari sebagian dari esensi agama Islam<sup>13</sup>

Jika kita melihat secara umum hubungan antara agama dan politik, penting untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tempat agama dalam kehidupan individu. Pada kasus seseorang yang agama memiliki makna bagi mereka dan bukan hanya kepatuhan formal semata, ada dua poin yang dapat ditekankan. Pertama, gagasan-gagasan agamanya membentuk kerangka intelektual di dalamnya ia melihat seluruh aktivitasnya berlangsung. Dari hubungan ini dengan konteks yang lebih luas, aktivitas-aktivitasnya mendapatkan makna, dan pertimbangan atas hubungan ini dapat mempengaruhi rencana umum hidupnya dengan cara tertentu. Kedua, karena agama membawa kesadaran akan konteks yang lebih luas di mana tujuan-tujuan dalam hidup ditetapkan, agama sering kali menghasilkan motif-motif bagi aktivitasnya; bahkan, tanpa motif yang diberikan oleh agama, beberapa aktivitas tidak dapat dilakukan. Dari kedua poin ini terlihat bahwa agama memiliki posisi sentral dalam kehidupan seseorang, bukan karena menentukan banyak detail (meskipun dalam beberapa kasus mungkin demikian), tetapi karena memberikan tujuan umum dalam hidup dan membantu mengkonsentrasikan energinya dalam mencapai tujuan tersebut.

Ketika agama dipahami secara individualistik, yaitu ketika selain ritual dan ibadah, agama lebih berkaitan dengan masalah-masalah moral individu, maka agama tersebut akan memiliki sedikit relevansi dengan

---

<sup>13</sup> Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1990), h V. Dan lihat Muhammad Azhar, *Filsafat Politik; Perbandingan Antara Islam dan Barat* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1996), hlm. 3..

politik. Jika beberapa panduan moral individu agama tersebut bertentangan dengan ide-ide moral yang umum diterima dalam masyarakat dan ditegakkan oleh negara misalnya jika agama mengatakan bahwa membawa senjata sebagai prajurit adalah dosa ada kemungkinan terjadi konflik. Poin-poin seperti itu cenderung menjadi hal yang perifer, meskipun perasaan yang timbul mungkin pahit. Namun, situasinya sepenuhnya berbeda ketika pandangan agama bersifat komunal. Dalam Islam, solidaritas komunal selalu memiliki tempat yang menonjol, dan hal ini masih berlaku hingga saat ini. Islam sejak awal relevan dengan organisasi politik dan sosial komunitas. Memang, pada awalnya ada penekanan pada fakta bahwa penghunian surga atau neraka bagi manusia untuk selamanya didasarkan pada basis individualistik; tetapi (seperti akan terlihat nanti) seiring berjalannya waktu, pandangan umum umat Muslim adalah bahwa tidak ada yang tetap menjadi anggota komunitas Islam yang akan kekal di neraka selamanya.<sup>14</sup>

Disini lain ada pula yang menganggap bahwa filsafat politik islam merupakan bagian dari diri manusia yang berusaha untuk menemukan hikmah bagi dirinya sendiri maupun diperuntukkan bagi orang lain, sesuai dengan firman Allah (QS. Al-Baqarah : 269).

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ

وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

Artinya: Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah). (QS. Al-Baqarah : 269)

Berdasarkan uraian di atas, maka secara reflektif landasan epistemologis politik Islam menempatkan berbagai potensi dasar yang ada pada manusia secara utuh, karena potensi dasar tersebut diyakini sebagai pemberian dan cerminan kasih sayang Allah kepada manusia.

<sup>14</sup> Montgomery Watt W, *Islamic Political Thought* (Edinburgh: Edinburgh University Press., 1980). h 28.

Potensi dasar yang dimaksud antara lain adalah indrawi, akal budi dan hati nurani (intuisi), sehingga dengan berbagai potensi dasar kemanusiaan inilah, maka manusia berkeinginan dan berkemampuan untuk mengetahui dan memahami semua realitas kesemestaan<sup>15</sup>

Aspek manusia memainkan peran sentral dalam filosofi politik Islam. Dalam pandangan filosofi politik Islam, manusia dianggap sebagai khalifah (wakil) Tuhan di muka bumi dan memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam menjalankan pemerintahan dan mengelola urusan dunia dan menuju pada kesempurnaan menuju dunia ataupun akhirat. Kesempurnaan manusia menurut al-Farabi sesuai dengan watak alamiah manusia itu sendiri, tidak akan tercapai tanpa berhubungan dengan manusia-manusia yang lain. Lebih lanjut, pendapatnya mengenai kebahagiaan dalam negara menekankan keharusan negara berdiri di atas landasan akhlak mulia dan kesanggupan berbuat baik. Kebaikan dan musyawarah kata al-Farabi seperti yang dikutip dalam buku *The Political Aspects of Islamic Philosophy* adalah dua elemen penting dari kebajikan praktis.<sup>16</sup> Dalam hal ini Allah berfirman

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ

وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: *Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.*

(Al Araf ayat 96)

Dari ayat tersebut bisa dilihat bahwa islam memiliki peran yang signifikan sebagai landasan dalam filsafat politik. Sebagai agama yang mencakup aspek kehidupan secara menyeluruh, Islam menyediakan kerangka kerja dan prinsip-prinsip yang dapat membimbing pembentukan sistem politik dan pengambilan keputusan politik. Dalam

---

<sup>15</sup> Suparman Syukur, *Epistemologi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) Dalam karya Suparman Syukur ini membahas epistemologi Islam secara lebih luas dan mendalam, baik secara historis maupun secara esensial...

<sup>16</sup> Muhsin Mahdi, *The Political Aspects of Islamic Philosophy* (Harvard: Harvard University Press., 1992). h 107.

Islam, manusia yang beriman memiliki peran yang penting sebagai kerangka acuan dalam filsafat politik Islam. Islam mengajarkan bahwa individu yang memiliki iman yang kuat memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam konteks politik.

1. Sebagai kerangka acuan filsafat politik Islam, manusia yang beriman memiliki karakteristik dan tanggung jawab tertentu. Pertama, manusia yang beriman percaya sepenuhnya pada keberadaan Allah SWT sebagai Pencipta dan Pemelihara alam semesta. Mereka mengakui kebesaran dan kekuasaan Allah serta tunduk pada kehendak-Nya.
2. Kedua, manusia yang beriman memiliki keyakinan bahwa hukum-hukum dan prinsip-prinsip Islam adalah petunjuk utama dalam mengatur kehidupan individu dan masyarakat, termasuk dalam konteks politik. Mereka menjadikan ajaran Islam sebagai panduan dalam pengambilan keputusan politik dan pembentukan sistem politik yang adil.
3. Ketiga, manusia yang beriman memiliki kesadaran akan tanggung jawab moral dan sosial dalam menjalankan urusan politik. Mereka bertindak dengan integritas, kejujuran, dan keadilan, serta mempertimbangkan kepentingan umum dalam setiap keputusan politik yang mereka buat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, Taha. *Rūḥ al-diin min dhayq al-‘almaniyah ilaa sa’ati all’imaniyah*. Casablanca: Al-Markaz al-tsaqafiy al-arabiy, 2012.
- Abidin, Habibah Zainol. *Kitāb al-burhān*. Louvain: Secrétariat du CorpusSCO, 1960.
- Adan, Hasanuddin Yusuf. “PARTAI POLITIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM.” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 3, no. 1 (2004): 487–497.
- Aflatun, Talkhis Nawamis. *Franciscus Gabrieli (“Corpus Philosophorum Medii Aevi, Corpus Platonieum, Plato Arabus,” Vol. 3)*. London: The Warburg Institute, 1952.
- Ahmad, Khwaja Jamil. *Seratus Muslim terkemuka*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Ahmad, Zain. *The Epistemology of Ibn Khaldun*. New York: Routledge, 2004.
- Al-Andalusī, Šā‘id Ibn Aḥmad. *Tabaqāt al-umam*. Beirut: L. Sheikho, 1912.
- Al-Azm, Talif Rafiq. *Ashhar mashahir al-Islam fi al-ḥurub wa-al-Siyasah*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1972.
- Al-Azmeh, Aziz. *Ibn Khaldun: A Reinterpretation*. New York: Routledge, 2012.
- Al-Baghdādī, ‘Abd al-Qāhir Ibn Ṭāhir. *Usul al-Din*. Beirut: Maṭba’at al-Dawlah, 1963.
- Al-Farabi. *Al-Siyasah Al-madaniyah*. Beirut: al-Maṭba’ah al-Kāthūlīkīyah, 1964.
- . *Kitab ara’ ahl al-madinah al-fadilah*. Beirut: Mir Muafá Fahm al-Kutub, 1906.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfā min ‘ilm al-ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyya, 2010.
- Al-Ghazali, Muhammad. *As Sunnah An Nabawiyyah Baina Ahl Al Fiqh Wa Ahl Al Hadits*. Cairo: Daar Asy Syuruuq, 1989.

- . *Fiqh-u-seerah: Understanding the Life of Prophet Muhammad*. Riyadh: International Islamic Publishing House, 1997.
- . *Fiqh al-sirah [Knowledge of the Epic of the Prophet Muhammad]*. Cairo: Dar al-Shorouq, 2003.
- . *Khulq al-Muslim [Character of the Muslim]*. Cairo: Nahdet Misr, 2005.
- . *Muslim Women between Backward Traditions and Modern Innovations*, 2002.
- . *Our Beginning in Wisdom*. New York: Octagon Books, 1975.
- . *Remembrance and Prayer: The Ways of Prophet Muhammad*. Markfield: Islamic Foundation, 2006.
- . *Stop Worrying, Relax And Be Happy*. London: Al-Firdous, 2002.
- . *Sunna Of The Prophet: People Of Fiqh Versus The People Of Hadith*. Cairo: Dar Al Taqwa, 2009.
- . *The Future of Islam in the West: How to Approach it ?* Cairo: Dar Al Taqwa, 2001.
- . *trans. Aisha Bewley, The Sunna of the Prophet: the People of Fiqh versus the People of Hadith*. London: Dar Al Taqwa, 2009.
- . *Trans. Ashur A. Shamis, A Thematic Commentary on the Qur'an*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2000.
- . *Within the Boundaries of Islam: A Study on Bid'ah*. Kuala Lumpur: The Other Press, 2010.
- Al-Hanbali, Qadi Abu Ya`la Muhammad bin al-Husain al-Fark. *Al Ahkam al-sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Isy, Yusuf. *Dinasti Abbasiyah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Al-Kindi. *Rasa'il al-Kindi al-falsafiyah*. Cairo: Abu Rida, 1950.
- Al-Mawardi. *Ahkam SulthAniyah*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Al-Qifti, Ali ibn Yusuf. *Tarikh al-Hukama*. Diedit oleh Julius Lippert.

- Dieterich: Mahad Tarikh al-Ulum al-Arabiyya wal Islamiyya, 1903.
- Al-Tanji, Muhammad Ibnu Thawit. *Al-Ta'rif bi Ibni al-Khaldun wa Rihlatuhu Ghharban wa Syaman*. Misr: Lajnah al-Ta'lif wa al-Tarjamah wa al-Nashr., 1951.
- Al-Thabari. *Tarikh al-Umam wa al-Muluk, Juz V Cet. I*. Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
- Alatas, Syed Farid. *Applying Ibn Khaldūn: The Recovery of a Lost Tradition in Sociology*. New York: Routledge, 2014.
- Amin, Samsul Munir. *Sejarah Peradaban Islam. Cet. II*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Baker, Raymond William. *Islam without Fear: Egypt and the New Islamists*. Cambridge, Massachusetts and London: Harvard University Press, 2003.
- Bannan, Talal Saleh. "Ibn-Taymiyyah's theory of political legitimacy." *UMI*. University of Nebraska, 1989.
- Baswedan, Anies Rasyid. "Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory." *Asian Survey* 44, no. 5 (2004): 669–690.
- Bouhdiba, Abdel Wahab. *The Different Aspec of Islamic Culture The Individual and Society Islam*. London: UNESCO, 1998.
- Brahim, Aounat. *History of Ibn Khaldun Part 4*. Algeria: University Boumerdes, 2020.
- Bunge, Don S. Browning and Marcia J. *Children and Childhood in World Religions: Primary Sources and Texts (Rutgers Series in Childhood Studies)*. Brunswick: Rutgers University Press., 2009.
- Chanafiah al-Jauhari, Imam. *Hermeuneutika Islam: Membangun peradaban Tuhan di Pentas Global*. Yogyakarta: Ittiqa, 1999.
- Chanthalangsy, Phinith, Crowley, John. *Philosophy manual: a South-South perspective*. Rabat Morocco: UNESCO, 2014.
- Donato, Massimo Campanini and Marco Di. *Islamic Political Theology*. Lanham: Lexington Books, 2021.
- Dunning, William Archibald. *A History of Political Theories, Ancient*

*and Mediaeval*. Allahabad: Central Book Depot, 1966.

Esposito, John L. *Islam and Politics*. New York: Syracuse University Press, New York: Syracuse University Press, 1992.

Fakhry, Majid. "Greek philosophy: impact on Islamic philosophy." *Routledge Encyclopedia of Philosophy* (1998).  
<https://www.rep.routledge.com/articles/thematic/greek-philosophy-impact-on-islamic-philosophy/v-1#>.

Farabi, Muhammad b. Muhammad al-. *Ihsa' al-'Ulum*. Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1949.

Filoramo, Giovanni. *Che cos'è la religione. Temi metodi problemi*. Itali: Einaudi, 2004.

Fuller, Graham E. *The future of political Islam*. New York: Palgrave Macmillan, 2003.

Gabrieli, Francesco. *Plato arabus: Alfarabius Compendium legum Platonis. III, Volume 3*. London: In Aedibus Instituti Warburgiani, 1952.

Goodin, Robert E., dan Philip Pettit. *Contemporary Political Philosophy*. England: Blackwell, 1997.

Haekal, Muḥammad Ḥusain. *Umar bin Khattab*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1998.

Hanafi, Hasan. *Oksidentalisme, Sikap Kita Terhadap Tradisi Barat, Terjemahan : M. Najib Buchor*. Jakarta: Paramadina, 2000.

Hasjmy, A. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Hatta, Ahmad. *Tafsir Quran Perkata*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009.

Heckscher, Eli Filip. *Mercantilism*. London: George Allen & Unwin Ltd, 1962.

Hisyam, Ibnu. *Sirah Nabawiyah*. Jakarta: Qisthi Press, 2019.

Hooker, M. B. *Indonesian Islam : social change through contemporary fatawa*. Honolulu: University of Hawai'i Press, n.d.

Islam, Dewan Ensiklopedi. *Ensiklopedi Islam, jilid I, cet 9*. Jakarta:

- Icchtiar Van Hoeve, 2001.
- Jason, Brennan. *Filsafat Politik*. Diedit oleh Sukron Hadi. Washington, D.C: Friedrich Naumann Foundation Indonesia, 2020.
- Karim, Abdul. *Sejarah Pemikiran dan Perkembangan Islam*. Yogyakarta: Bagaskara, 2012.
- Khallikan, Ibn. *Wafayat Al Ayan Wa Anba Abna Al Zaman*. Cairo: Maktabat al-Nahda al-Misriyya, 1948.
- Khan, M. A. Muqtedar. "The political philosophy of Islamic resurgence." *Sagepub* 13, no. 2 (2001): 211–229.
- Khomeini, Imam. *Exposition of Forty Hadith*. 16 ed. Tehran: Institute for Compilation and Publication of the Works of Imam Khomein, 1998.
- . *Islamic Government: Governance of the Jurist. Terjemahan*. Tehran: The Institute for Compilation and Publication of Imām Khomeinī's Works, 2002.
- . *Syarh al-'Arba'in al-Haditsan*. Bandung: Mizan, 2009.
- Al Khudhairi, Zainab. *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun*. Bandung: Pustaka, 1987.
- Kumar, Deepa. *Islamophobia and the Politics of Empire*. Chicago: Haymarket Books, 2012.
- Kundnani, Arun. *The Muslims Are Coming!: Islamophobia, Extremism, and the Domestic War on Terror*. London: Verso Trade, 2014.
- Leaman, Oliver. *A Brief Introduction to Islamic Philosophy*. Cambridge: Polity Press, 1999.
- Maarif, Ahmad Syafii, dan M Solihat. . . *Ibn Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur*. Jakarta: Gema Insani., 1996.
- Madjid, Nurcholish, dan Ahmad Gaus AF. *Kaki Langit Peradaban Islam*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Mahdi, Muhsin. *The Political Aspects of Islamic Philosophy*. Harvard: Harvard University Press., 1992.
- Majid, Fakhry. *A History of Islamic Philosophy*. New York: Columbia

- University Press, 1983.
- Mandaville, Peter. *Global Political Islam*. London: Routledge, 2007.
- March, Andrew F. "Political Islam : Theory." *Annual Review of Political Science* 18, no. 1 (2015): 103–123.
- Moss, Laurence S. *Joseph A. Schumpeter: Historian of Economics: Perspectives on the History of Economic Thought*. New York: Routledge, 1996.
- Muhammad, Ali Abdul Mu'ti. *Filsafat politik : Antara barat dan islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Musa Asy'arie. *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: LSIF, 1992.
- Musa, Mohammad Yusuf. *Memorial Avicenne I*. Cairo: Institute Francais d'Archeologie Orientale, 1952.
- Musa, Muhammad Yusuf. *Ibn Taimiyah wa 'ahlam al arab*. Cairo: Maktabah, 1962.
- . *Sociologie et la politique dans la philosophie d'Avicenne*. Mansurat al-mu'ahid al-'alami al-faransi, 1952.
- Nasution, Amhar. "Perkembangan Ilmu Pengetahuan Pada Periode Harun Al-Rasyid Dan Al-Makmun" II, no. 02 (2017): 395–402.
- Nasution, Harun. *Falsafat Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Nasution, Syamruddin. *Sejarah Peradaban Islam Cet. III*. Pekanbaru-Riau: Yayasan Pusaka Riau, 2013.
- Noer, Deliar. *Mengapa Partai Islam Kalah? : Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu '99 sampai Pemilihan Presiden*. Jakarta: Alvabet, 1999.
- . *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. Bandung: Mizan, 1998.
- Oliver Leaman (ed), Syed Hossein Nasr. *History of Islamic Philosophy*. London and New York: Routledge, 2001.
- Pamil, Jon. "Transformasi Filsafat Yunani Ke Dunia Islam Dan Kemunculan Filsafat Islam." *An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam* 37,

no. 2 (2012): 103–111.

Plant, Rymond. *Modern Political Thought*. England: Blackwell, 1991.

Plato. *Republic*. London: Macmillan, 1951.

Qutaybah, Abu Muhammad 'Abd Allah Ibn Muslim A. Ibn. *Al Imamah Wa Siyazah*. Cairo: Turath For Solutions, 2013.

Qutaybah, Abū Muḥammad 'Abd Allāh ibn Muslim Ibn. *Kitāb al-ma'ārif*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1969.

Rabi', Ibn Abi. *Suluk Al-Malik Fi Tadbir Al-Mamalik*. Edited by Arif Ahmad Abd alGhani. Damaskus: Dar al-Kinan, 1996.

Rabi', Syihabuddin Ibn Abi. *Suluk al- Malik fi Tadbir al-Mamalik*. Kairo,: Dar al-Syi'bi, 1980.

Rabi`, Ibnu Abi. *Suluk al-Malik Fiy Tadbir al-Mamalik*. Kairo: Dar al-Sya`b., 1970.

Rahman, Fazlur. "A Recent Controversy over the Interpretation of 'Shūrā.'" *Chicago Journals* 20, no. 4 (1981): 291–301.

———. *Islam, terj. Ahsin Muhammad*. Bandung: Pustaka Salman, 2000.

Rane, Halim. *Emerging Trends in Islamists political thought, implications for Islam-West Relations, National Centre of Excellence for Islamic Studies*. Nathan, Australia: Griffith University, 2010.

Rescher, Nicholas. "Al-Farabi on Logical Tradition." *Journal of the History of Ideas* 24, no. 1 (1963): 127–132.  
[https://www.jstor.org/stable/2707863?read-now=1&seq=6#page\\_scan\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/2707863?read-now=1&seq=6#page_scan_tab_contents).

Rosen, Allen D. *Kant's Theory of Justice*. New York: Cornell University Press, 1996.

Roy, Olivier. "GLOBALIZED ISLAM: THE SEARCH FOR A NEW UMMAH." *Islamology* 7, no. 1 (2007): 11–40.

Sachedina, Abdulaziz. *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*. Oxford: Oxford University Press, 2001.

- Sadiki, Larbi. *The Search for Arab Democracy: Discourses and Counter-Discourses*. London: Hurst & Company, 2004.
- Sa'd, Muhammad Ibn. *Tabaqat al Kubra. Volume 1*. Colombus Ohio: Mu'assasat al-Nasr, 1904.
- Salvatore, Armando. *Islam and the Political Discourse of Modernity*. Virginia: Ithaca Press, 2000.
- Sharif, MM. *A History of Muslim Philosophy. (Volume One)*. Delhi: Low Price Publications., 1995.
- Sina, Ibn. *Aqşam al-'Ulum al-'Aqliyyah (The Parts of Rational Sciences)*. Cairo: Matba'ah Hindiyah, n.d.
- Sirojuddin, Aly. *Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik Dan Gagasan*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Sjadzali, Munawir. *Kepala Negara, Keadilan, Rakyat, Dan Pengelolaan*. Jakarta: UIPress, 1993.
- Strauss, Leo. *Natural Right and History (Walgreen Foundation Lectures)*. Chicago: University of Chicago Press, 1953.
- . "The Law of Reason in the 'Kuzari.'" *History* 13, no. 2 (1943): 47–96. <http://www.jstor.org/stable/3622291>.
- Su'aib, Yusuuf. *Sejarah Daulat Khulafaurrasyidin Cet. VII*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Suharto, Toto. *Epistemologi Sejarah Kritis Ibnu Khaldun*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003.
- Sunarto, Ahmad. *Terjemah Riyadhus Sholihin Jilid I*. Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Suparman Syukur. *Epistemologi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Susanto, Hary. *Giancarlo Bosetti, Iman Melawan Nalar (Perdebatan Joseph Ratzinger Melawan Jurgen Habermas)*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Syadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 1990.

- Syalabi, Ahmad. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Al Husna Zikra, 1997.
- Taimiyah, Ibn. *Al-Siyasah al-Shar'iyah*,. Cairo: Dar al-Sha'b, 1971.
- Taylor, Charles. *Contemporary Political Philosophy*. England: Blackwell, 1997.
- Thohir, Ajid. *Perkembangan Peradaban Di Kawasan Dunia Islam ; Melacak Akar-Akar Sejarah, Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Usaybi'ah, Ibn Abi. *'Uyun al-anba*. Beirut: Nizar Rida, 1965.
- Volpi, Frederic. *Political Islam: A Critical Reader*. London: Routledge, 2013.
- W, Montgomery Watt. *Islamic Political Thought*. Edinburgh: Edinburgh University Press., 1980.
- Wajdi, Muhammad Farid. *Dairah al-Maarif al-Islamiyah Jilid 1*. Cairo: Kitab al-Syaab, 1969.
- Walzer, Richard. *Al-Farabi on the Perfect State*. Oxford: Clarendon Press, 1985.
- Wāqidī, Muḥammad ibn 'Umar. *The Kitab al-maghazi of al-Waqidi, Volume 2*. Diedit oleh Marsden Jones. Oxford: Oxford University Press, 1966.
- . *The Kitab al-maghazi of al-Waqidi Volume 1*. Diedit oleh Marsden Jones. Oxford: Oxford University Press, 1966.
- Ya'qubi, Ahmad ibn Abi Ya'qub. *Tarikh al-Ya'qubi Volume 2*. Beirut: Dar Sader, 2010.
- Yamani. "Filsafat Politik Islam : Antara Al- Farabi dan Khomeini." Bandung: Mizan, 2002.
- Yusuf, Himyari. "Eksistensi dan Karakteristik Politik Islam Suatu Inspirasi Bagi Formulasi Politik Kontemporer." *Jurnal Tapis* 10, no. 1 (2014): 104–122.
- Zahra, Imam Muhammad Abu. *Tarikh al-Jadl, cet I*. Dar al-Fikr al-.,Arabi, 1934.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ibnu taimiyah hayatuhu wa ashruhu*. Cairo:  
Dar Al-fikr Al-arabi, 2010.

**DAFTAR INDEX**

---

**A**

*Adab al-Dunya w-al-Din* · 111  
*adl* · 8, 9, 10, 42  
*ahl al-hall w-al-'aqd* · 117, 128  
*al- hakim* · 76  
*al- katib* · 76  
*al- mabadi al-barahin* · 70  
*al- tadbir* · 74  
*al-adad* · 70  
*Al-'Adalah* · 15  
*al-Ahkam al-Sultaniyah* · 90  
*al-Ahkam al-Sultaniyyah* · 111, 112  
*al-Ahkum al-Sultaniyyah* · 111  
*al-Alfaz al-Musta'malah fi'l-Mantiq* · 84  
*alam al-mulk* · 29  
*alam il* · 76  
*al-aql* · 158  
*al-ard* · 158  
*al-Athar al-'Ulawiyah* · 84  
*al-din* · 158  
*al-fi 'U* · 70  
*al-Fusul al-Khamsah* · 84  
*al-hajib* · 76  
*al-hikmah al-'amaliyyah* · 1  
*al-hikmah al-nazhariyyah* · 1  
*al-Imamah w-al-Siyasah* · 117  
*al-Iqna'* · 111  
*al-jalis* · 76  
*al-Jam 'Bayn Ra'yay al-Haki mayn* · 85  
*al-jund* · 76  
*al-kalam al-muta'akhhirin* · 33  
*Al-Khadimah* · 15  
*al-libas* · 79  
*al-lisan* · 70  
*al-ma'arif al-hikmiyah* · 69  
*al-Madinah al-Fadilah* · 82, 85  
*Almagest* · 85  
*al-Majasti* · 85  
*al-mal* · 158  
*al-malakut* · 29  
*al-malik* · 74

*al-mantiq* · 70  
*al-Mukhtasar* · 110  
*al-nafs* · 158  
*al-Nuqlah ila'l-Iqa'* · 83, 85  
*al-quwwah* · 70, 74  
*al-Sama' al-Tabi'i* · 84  
*al-Sama' wa'l-'Alam* · 84  
*Al-Shams* · 160  
*al-Sirah al-Fadilah* · 82  
*alsiyasa al-'adila wa'l wilaya al-saliha* ·  
161  
*al-Siyasah al-Madaniyah* · 82, 85  
*Al-Siyasat al-shar'iyah* · 169  
*al-Sunnah al-Nabawiyya* · 145  
*al-Tanbih 'ala Sabil al-Sa'adah* · 85  
*Amir bi al-Istila* · 127  
*Analytica Posteriora* · 84  
*Analytica Priora* · 84  
*aqal* · 69  
*Aqda al-Qudat* · 110, 113  
*aqil, ma'qul* · 87  
*aqilah* · 68  
*aql mustafad* · 87  
*asabiyyah* · 178, 179, 184  
*As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Ishldh Ar-Rd'i  
wa Ar-Ra'iyah* · 161  
*Averroes* · 5, 55, 56, 86, 169  
*Avicenna* · 5, 53, 55, 56, 169

---

**B**

*bahimah* · 68  
*Bait al-Hikmah* · 53, 54  
*bid'ah* · 170  
*bima yajib* · 181  
*burhani* · 188

---

**D**

*daallah* · 92  
*da'if* · 181

dallah · 97  
*Dar al-Salam* · 88  
*daruri* · 187  
*De Anima* · 186  
*de facto* · 127, 162  
*dzihn* · 69

---

**E**

*Episteme* · 29

---

**F**

*Falasifah* · 184  
*fasiqah* · 92  
*fasiqh* · 97  
*Fi Ism al-Falsafah* · 85  
*Fi ma Yas 'uh wa la Yas 'uh min 'Ilm*  
    *Ahkam al-Nujum* · 85  
*Fi'i Ittifaq Ara 'Aflatun wa Aristutalis* · 85  
*Fi'l Iqa'* · 83  
*Fi'l-Falsafah wa Sabab Zuburiha* · 85  
*Fi'l-'Ilm al-Ilahi* · 85  
*Fi'l-Mawjudat al-Mutaghayrah* · 84  
*FiMahiyat al-Nafs* · 84  
*fisq* · 86  
*fuqaha* · 183  
*Fusul Murtaza'ah min Aqawil al-Qudama* ·  
    85

---

**H**

*hai'at* · 70  
*handasah* · 70  
*hasab* · 94  
*hayat al-ruh* · 69  
*historiografer* · 57  
*hizb* · 198  
*huku- ma* · 75

**I**

*ignorant* · 92  
*Ihsa' al-'Ulum* · 82, 85, 185, 208  
*Il Principe* · 78  
*ijtima'* · 100  
*Ikhwanul Muslimin* · 18  
*Ilahiah* · 15, 185  
*ilahiyat* · 69, 70, 78  
*Ilmu Muqaddimah* · 57  
*Imaginasi Politik Islam* · 61  
*Insan al-Kamil* · 28  
*Insaniah* · 15  
*Ishlah* · 20  
*ittifaq* · 107  
*ittisal* · 87

---

**J**

*jadal* · 91  
*jumhur* · 96

---

**K**

*karamah* · 93  
*Katib al-Jundi* · 52  
*Katib al-Kharraj* · 52  
*Katib al-Qudat* · 52  
*Katib al-Rasail* · 51  
*Katib al-Syurtah* · 52  
*Khalifat Allah* · 121  
*Khalifat al-Rasul Allah* · 122  
*kharaj* · 123  
*khissah* · 93  
*Khulafa ar-rasyidah* · 6  
*khushu'* · 101  
*Kitab al-Hawi* · 111  
*Kitab al-Huruf* · 84  
*Kitab al-Iqna* · 110  
*Kitab al-Musiqah al-Kabir* · 83, 85  
*Kitab al-Nawamis* · 85  
*Kitab al-Qiyas* · 84  
*Klienelisme* · 51

Korespondensi · 49

---

**L**

*Logos* · 28, 29

---

**M**

*madzmumah* · 68

*mahmudah* · 68

*Malik al-Muluk al-A'zam* · 110

*mariqah* · 98

*maşlahah* · 169

*Min Huna Nalam* · 145

*Minhaj al-sunnah* · 169

*mithalat* · 91

*mizaj* · 178

*mubadillah* · 92

*muharrifah* · 97

*muqarabah* · 87

*muta'ahhilun* · 75

*muta'aqqil* · 87

*mutaqqanisun* · 97

*mutwahhid* · 100

---

**N**

*nadhalah* · 93

*naqafil* · 76

*nomoi* · 179

---

**O**

*Ontos* · 28

*Organon* · 83

---

**P**

*Parts of Rational Sciences* · 185, 186, 212

*Patronase* · 51

*Phaedo* · 108

*policy* · 14

*politea* · 1

*post-secularism* · 58

---

**Q**

*qalu* · 103

*Qawanin al-Wizarah* · 111

*qiyas* · 169

---

**R**

*ra'is* · v, vi, 86, 87, 88

*rashidun* · 170

*ribat* · 103

*rigorous* · 1

*Risalah fi'l-Tawti'ah* · 84

*riyadliyat* · 69, 70, 78

*rusum* · 91

---

**S**

*Sayyid al-qawm khaadimuhum* · 15

*Shafaqli Al-Bukhari* · 167

*shahib al- syurthah* · 76

*shahib alk-tha 'am wa al-syarab* · 77

*Shara'it al-Yaqin* · 84

*Sharh Kitab al-'Ibarah* · 84

*Sharh Sadr Kitab al-Akhlaq li-'Aristutahs* ·  
85

*Shifa'* · 187

*Shura* · 8, 31

*shuruh* · 84

*Siyasat Nameh* · 31

*Siyasut al-Mulk* · 111

*syuro* · 31

---

**T**

*ta hawur* · 68

*tabi'i* · 187  
*taghalub* · 101, 103  
*Tahsil al-Sa'adah* · 85  
*Tanzhim al-Islam* · 19  
*Tarikh al-Jadl* · 53, 213  
*tasaabih* · 102  
*Tawazun* · 15  
*ta'wil* · 70, 97  
*teokratis* · 25  
*thabi'iyat* · 69  
*The Golden Age* · 52  
*the theory of being qua being* · 28  
*Timokrasi* · 94

---

**U**

*Ummah* · vi, 26, 61, 62, 153  
*ummatan wasatan* · 132

*umran* · 179  
*Uswah Al-Hasanah* · 15

---

**V**

*Vanguard* · 61

---

**W**

*wahy* · 91  
*wazir* · 76, 77  
*wuhush* · 102